

**REPRESENTASI HEGEMONI KEKUASAAN MASYARAKAT
JAWA DALAM NOVEL *DASAMUKA*
KARYA JUNAEDI SETIYONO**
*(Representation Hegemony Power of Java's Citizens Inside Dasamuka Novel
By Junaedi Setiyono)*

Galuh Farah Rahma Yunita, Candra Rahma Wijaya Putra
Pendidikan Bahasa Indonesia
Universitas Muhammadiyah Malang
Jalan Raya Tlogomas 246, Malang, Indonesia, Telepon/Faksimile (0341)464318
Pos-el: galuhfarah28@gmail.com,
candra_rwp@umm.ac.id

Diterima 29 Juni 2020

Direvisi 23 September 2020

Disetujui 3 Oktober 2020

<https://doi.org/10.26499/und.v16i2.2764>

Abstrak: Karya sastra tidak hanya berperan sebagai potret kompleksitas kehidupan di masyarakat, tetapi juga mampu membentuk, mengubah, dan menata kembali ideologi pembacanya. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan potret hegemoni kekuasaan dan struktur sosial masyarakat Jawa era 1810–1824 yang terepresentasikan dalam novel *Dasamuka* karya Junaedi Setiyono. Pendekatan sosiologis dipilih karena sastra tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat sebagai objek pembahasan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah hegemoni Gramsci. Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan potret hegemoni dengan melibatkan kompleksitas permasalahan masyarakat yang tergambarkan di dalam novel tersebut, dan untuk mendeskripsikan struktur sosial masyarakat Jawa di era 1810–1824 dalam novel tersebut. Data penelitian berupa satuan cerita berwujud kutipan dialog dan monolog tentang hegemoni kekuasaan, juga struktur sosial. Sumber data penelitian berasal dari novel. Berdasarkan hasil penelitian, hegemoni kekuasaan berlangsung pada masyarakat politik dan masyarakat sipil, yang keduanya memiliki konkritisasi tersendiri. Adapun struktur sosial yang tergambar dalam novel *Dasamuka* karya Junaedi Setiyono diduduki oleh penjajah/kolonialisme, bangsawan, dan wong cilik.

Kata kunci: hegemoni kekuasaan, struktur sosial, sosiologi sastra

Abstract: Not only work as complexity in real life, creation of literature also create, change, reorganize the reader's ideology. The goal of this research is describing portrait of hegemony power and Java social structure era 1810 – 1824 that has been presented on novel titled *Dasamuka*, by Junaedi Setiyono. A sociological approach was chosen because literature cannot be separated from existence of society as topic object. This research is using hegemony Gramsci theory. Therefore, this research method using descriptive qualitative to describing portrait of hegemony by involving complexity social problems which is imaged on that novel, and describing Java's social structure at 1810 – 1824 on that novel. The data is formed as story existed as quotation dialog and monolog about hegemony power and social structure. The source of this data research is from novel. Based on research result, hegemony power goes on politic society and civil society, both of them have their own concretization. As for social structure that pictured on novel titled *Dasamuka* by Junaedi Setiyono occupied by invaders/colonialism, nobleman, and low class people.

Key words; hegemony of power, social structure, sociology of literature

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 1811, penolakan terhadap kaum feodalisme terus digencarkan oleh Stamford Raffles karena ketidaksepahaman dengan sistem otoritas di lingkup kerajaan. Komponen pemahaman feodalisme tersebut, berupa pewarisan hak milik dan status kekuasaan yang dilakukan oleh bangsawan sekelas raja secara turun-temurun, yang justru berbuntut pada kompleksitas kehidupan masyarakat subordinat, baik di bidang politik, keyakinan, ekonomi, budaya, hingga intelektual dan moral. Sebab itu, untuk merebut, membentengi, dan mempertahankan wilayah kekuasaannya, Raffles sebagai kelompok yang mendominasi seringkali melakukan tindak kekerasan fisik, seperti menjarah, membunuh, atau justru melalui penguasaan ideologi secara konsensus, sehingga kelompok proletar menerimanya dengan sukarela (Harjito, 2014, hlm 16).

Lebih lanjut, strategi penguasaan melalui ideologi di atas, ditujukan untuk melayani segala relevansi pihak yang berkuasa karena telah memberikan legitimasi, yaitu suatu pengakuan masyarakat terhadap wewenang dan kebijakan pemimpin, meskipun wujud konkret legitimasi tidak sepenuhnya direalisasikan. (Hatmoko, Sumartini, & Mulyono, 2014) mendeskripsikan ideologi sebagai kecenderungan berperilaku, kapabilitas pikiran, hakikat religius, serta segala bentuk relasi sosial, khususnya keterkaitan antara moral dan intelektual (hlm. 3).

Berbicara mengenai ideologi sejatinya tidak dapat dilekangkan dari konsep hegemoni, begitu pun keduanya yang saling berkorelasi dengan kekuasaan. Ihwal tersebut turut

diperkuat Praptono (dalam Adji, 2019) yang menyatakan ideologi adalah ide substansial ketika menyinggung masalah kekuasaan karena untuk mempertahankan kekuasaan tersebut, golongan elite akan menghegemoni kelas alit (hlm. 3).

Selaras dengan pendapat di atas, Barker (dalam Andriana, 2011), bahwa hegemoni dipahami sebagai gagasan dan realisasi dari validitas yang bersifat universal untuk mendukung kekuasaan suatu kelompok tertentu (hlm. 115). Konsep inilah yang kemudian diasumsikan oleh Gramsci (Patria & Arief, 2015) sebagai rekayasan prinsip kehidupan dominan, yang di dalamnya tertanam sebuah konsepsi tentang realitas untuk disebarluaskan, baik melalui institusi atau pun perseorangan (hlm. 122) Dengan demikian, keterpautan antara hegemoni, ideologi, dan kekuasaan berupaya untuk mengekspos perspektif kontemporer dalam pengkajian sosiologi mengenai karya sastra, yang dewasa ini disimpulkan sebagai otoritas politik, kebudayaan, hingga sosial.

Di dalam karya sastra, hegemoni kekuasaan digambarkan melalui serangkaian aktivitas antara tokoh imajiner dari golongan berkuasa dengan masyarakat bawah yang berkedudukan sebagai objek protektorat, seperti kelas pekerja dan buruh, misalnya, atau justru terealisasi dalam kelas yang saling otoritatif. Tentu saja, ditunjang dengan keselarasan alur dan sekelumit peristiwa, yang diolah pengarang untuk memperkuat setiap tindak kebengisan tokoh dari golongan berkuasa. Persisnya, konsekuensi yang ditimbulkan dari kedua kelompok tersebut adalah lahirnya kelas sosial, yaitu politis dan sipil (Sari, 2017, hlm. 3).

Salah satu karya sastra yang menyuguhkan hegemoni kekuasaan adalah novel *Dasamuka* karya Junaedi Setiyono, yang digambarkan melalui segenap kompleksitas masyarakat Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono II. Lantaran hidup di bawah bayang-bayang kepemimpinan sultan yang penuh kontroversi itu, masyarakat Kasultanan harus merasakan dan memikul dampak dari kebengisan para kolonial, serta penguasaan intelektual dan moral yang dilangsungkan oleh kaum terpelajar dan bangsawan. Adapun deretan peristiwa yang berdampak pada kehidupan masyarakat tersebut, diawali oleh kolonial Belanda, sedangkan tampuk masalah terjadi ketika Raffles menahkodai bala tentara Inggris untuk merampok dan menjarah keraton di masa kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono II, yang keseluruhan disaksikan dan didokumentasikan oleh Willem.

Tentu saja sepak terjang kelompok iperialis, seperti Inggris dan Belanda yang berupaya menguasai Pulau Jawa dalam novel *Dasamuka* itu semakin memperkeruh tatanan sosial di Kasultanan Ngayogyakarta. Sehingga dalam kaitannya dengan kehadiran kelompok tersebut, struktur sosial juga perlu diuraikan. Salamini (dalam Harjito, 2014) mengemukakan, bahwa di dalam kehidupan masyarakat termuat keberagaman ideologi, yang selanjutnya mengarah pada terjadinya hegemoni jika dipertemukan dan dipadukan dengan kelompok dominasi (hlm. 14).

Demikianlah penelitian ini lebih memfokuskan pada keberadaan suatu kelompok dominan yang menguasai ideologi kelompok lain, baik dijalankan dengan dominasi atau secara konsensus.

Adapun permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pertama, potret hegemoni kekuasaan dalam novel *Dasamuka* karya Junaedi Setiyono, dan kedua, konstruksi struktur sosial masyarakat Jawa yang terepresentasikan dalam novel *Dasamuka* karya Junaedi Setiyono tersebut.

Peneliti memilih novel *Dasamuka* sebagai objek kajian karena selain menarik untuk diteliti dari segi hegemoni kekuasaan, dan struktur sosial masyarakat Jawa, novel tersebut merupakan salah satu pemenang Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) pada tahun 2014, yang di dalamnya juga menawarkan kompleksitas permasalahan masyarakat Jawa, meliputi kebudayaan, agama, sosial, politik, dan tradisi, yang disajikan secara konvensional melalui alur campuran.

Sejauh pengamatan peneliti, kajian terdahulu yang menaruh perhatian terhadap hegemoni kekuasaan masyarakat Jawa dalam novel *Dasamuka* karya Junaedi Setiyono belum ditemukan. Namun, topik kajian lain yang signifikan dengan novel *Dasamuka* sebagai objek material telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pertama, (Hidayati, Sarwiji, & Slamet, 2019) mengungkap aspek psikologis tokoh utama yang dituangkan dalam "*Kepribadian Tokoh Willem dalam Novel Dasamuka Karya Juanedi Setiyono*". Hasil pembahasan merujuk pada id, ego, dan superego tokoh utama bernama Willem.

Kedua, penelitian yang digarap oleh (Misbakhmunir, 2017) berjudul "*Analisis Strukturalisme Genetik Novel Dasamuka Karya Junaedi Setiyono dan Rencana Pembelajarannya di Kelas XI SMA*". Meskipun menempatkan

strukturalisme genetik sebagai tumpuan utama pengkajian. Namun, tujuan eksplorasi justru diarahkan pada unsur intrinsik novel. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya relevansi dengan Kompetensi Dasar (KD) 7.2, yaitu menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia atau terjemahan.

Ketiga, penelitian dari (Faizah, 2015) yang memilih novel *Dasamuka* karya Junaedi Setiyono sebagai bahan analisis yang bertautan dengan dimensi sosiologi sastra. Dalam penelitian yang berjudul "*Kajian Sosiologi Sastra dan Nilai Pendidikan Karakter Novel Dasamuka Karya Junaedi Setiyono*" tersebut, Faizah (2015) membuktikan adanya keterkaitan antara sosiologi sastra dengan aspek sosial di masyarakat meliputi, cinta, ekonomi, dan moral. Di samping itu, nilai-nilai pendidikan karakter memperlihatkan sikap jujur, bertanggung jawab, hingga nasionalisme.

Berbeda dengan ketiga penelitian yang telah dijabarkan di atas, penelitian keempat menganalisis unsur kekuasaan yang tertuang dalam "*Representasi Kekuasaan Tokoh Informal dalam Novel Dasamuka Karya Junaedi Setiyono*". Dalam ihwal pembahasan, kajian tersebut hanya mengulas dominasi tokoh informal yang tercermin melalui, aksi, ujaran, pesan, dan gagasan. Meskipun intisari berfokus pada kekuasaan, penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyowati, 2018) itu, tidak ada satu pun hasil yang membicarakan perihal kekuasaan atau dominasi yang berpautan dengan dimensi ideologi.

Dengan demikian, perbedaan dan keunggulan penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu terletak dari segi

permasalahan yang berfokus pada wujud hegemoni kekuasaan dan struktur sosial masyarakat Jawa. Adapun hakikat ideologi yang tidak dapat dilepaskan dari konteks hegemoni akan dibahas pula dalam penelitian ini sebagai pembeda dengan kajian sebelumnya (Sulistyowati, 2018).

2. KERANGKA TEORI

Adanya kelompok sosial yang mendominasi atas kelompok lainnya menjadikan teori hegemoni Antonio Gramsci dianggap relevan sebagai tumpuan penelitian ini. Hal tersebut karena dalam perspektif hegemoni Gramsci, karya sastra berupa novel tidak hanya diposisikan sebagai fenomena yang sekadar bertalian pada realitas kehidupan, namun juga kelompok sosial selaku infrastrukturnya (Zamzuri, 2017, hlm. 17)

Dalam konsep hegemoni Gramsci, tingkatan kelompok sosial diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu masyarakat politik, sipil, dan ekonomi (Siswati, 2017, hlm. 22). Dari ketiganya, konstruksi hegemoni akan diarahkan oleh golongan penguasa kepada masyarakat kelas bawah, dengan tujuan agar diterima, disebarluaskan dan diaplikasikan secara totalitas. Oleh sebab itu, penerapan hegemoni boleh dikatakan berhasil, ketika suatu kelompok sosial tertentu berpengaruh dalam mengendalikan dan mengintegrasikan kelompok lainnya.

Lebih lanjut, Patria & Arief (2015) memaparkan, bahwa kelompok sosial seperti di atas, misalnya, akan memperoleh suatu keunggulan berdasarkan dua cara, yaitu dominasi yang diartikan paksaan dan kepemimpinan moral juga intelektual (hlm. 119). Dari keduanya,

kepemimpinan moral dan intelektual menjadi 'jembatan' terealisasinya konsep hegemoni. Bagi Gramsci sendiri, kelompok sosial yang hidup di masyarakat sejatinya dikontrol oleh negara. Dalam catatannya yang berjudul "*Selecsion From The Prison Notebook: State and Civil Society*", Gramsci (1999) mengungkapkan adanya masyarakat sipil (*civil society*) dan masyarakat politik (*political society*) yang dinaungi oleh hegemoni secara paksa (hlm. 532).

Adapun Hendaro (dalam Harjito, 2014, hlm. 15) membagi hegemoni menjadi tiga tingkatan, yaitu pertama, hegemoni menyeluruh atau integral, dijabarkan melalui kesepakatan antara penguasa dan proletar, sehingga implementasinya di lingkungan masyarakat tidak akan ditemui suatu kesenjangan karena hubungan telah dirangkai secara kuat, juga saling memiliki kesatuan antara moral dan intelektual. Kedua, hegemoni merosot yang berlangsung ketika pemikiran atau pun tindakan masyarakat tidak sepaham dengan kepemimpinan yang berlaku. Jika situasi tersebut terjadi, maka timbul adanya kemungkinan atau peluang bagi masyarakat untuk menyepakati hal lain di luar kepemimpinan yang ada. Ketiga, hegemoni minimum atau bermasalah yang dilatarbelakangi oleh adanya penyangkalan antara penguasa dengan konsensus masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan itu dipilih karena sastra tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat. Dalam hal ini, Rifa'i (2018) menegaskan bahwa pendekatan sosiologis difokuskan untuk mengulas berbagai aspek yang bertalian

dengan manusia dan kompleksitas kehidupannya (hlm. 26). Adapun metode penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan potret hegemoni kekuasaan dalam novel *Dasamuka* karya Junaedi setiono, dan mendeskripsikan struktur sosial yang melibatkan kompleksitas kehidupan masyarakat Jawa yang tergambarkan dalam novel *Dasamuka* karya Junaedi Setiyono tersebut.

Data penelitian berupa kutipan satuan cerita berwujud dialog dan monolog tentang hegemoni kekuasaan dan struktur sosial. Sumber data penelitian berasal dari novel *Dasamuka* karya Junaedi Setiyono. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dengan tahapan membaca novel *Dasamuka* karya Junaedi Setiyono sebagai objek penelitian, membaca buku-buku dan sumber lain yang relevan dengan masalah penelitian, terutama berkaitan dengan bentuk hegemoni kekuasaan dan struktur sosial. Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam analisis data yaitu, (1) mengidentifikasi data, (2) mengklasifikasikan data, (3) menganalisis data, dan (4) penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Selaras dengan judul objek kajian, novel *Dasamuka* karya Junaedi Setiyono menyuguhkan kerumitan hidup masyarakat Jawa, khususnya wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Tersingkap, pada tahun 1811, serdadu Inggris menguasai Pulau Jawa setelah berhasil menaklukan Belanda. Akibatnya pun terlihat dari adanya campur tangan Inggris yang berupaya mengendalikan sistem kepemimpinan sultan atau raja Jawa.

Di samping itu, sebagai salah satu karya sastra yang menyuguhkan rivalitas antara golongan berkuasa dengan kalangan bawah, novel *Dasamuka* karya Junaedi Setiyono juga mengungkap hadirnya hegemoni kekuasaan yang terjadi dalam lingkup keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Tentunya, kekuasaan yang berhasil diaplikasikan turut menyeret aspek ideologis dari pihak yang terhegemoni. Gambaran hegemoni kekuasaan dideksripsikan oleh peneliti sebagai berikut.

4.1 Potret Hegemoni Kekuasaan dalam Novel *Dasamuka* Karya Junaedi Setiyono

Potret hegemoni kekuasaan digambarkan melalui rentetan peristiwa, aktivitas, dan atau tingkah laku yang diwakilkan oleh para tokoh dari dua kelas sosial, yaitu masyarakat politik dan masyarakat sipil. Dari keduanya, sistem kekuasaan lebih merujuk pada golongan yang sangat mendominasi, sehingga dapat mengemudikan kelas di bawahnya.

Dalam pesebarannya di lingkungan masyarakat Jawa, cakupan domain yang mengalami hegemoni kekuasaan berlanjut di antara petinggi keraton dengan para penjajah. Gramsci (dalam Sari, 2017) mengasosiasikan hegemoni antarkeduanya berpeluang untuk dilangsungkan secara diktator (hlm. 45). Artinya, penguasa memiliki kehendak menggunakan kekerasan atau kemufakatan untuk mendapatkan kedudukan.

4.1.1 Masyarakat Politik

Di dalam skop wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, keberadaan masyarakat politik diwakilkan oleh segala kiprah kompeni

Belanda dan para cecenguk pemerintahan Inggris, yang berupaya untuk saling berebut dan melindungi tatanan kekuasaan Kasultanan Ngayogyakarta, baik di dalam maupun di luar batas negara. Adapun dalam praktiknya, masyarakat politik kerap kali mencerminkan kebengisan, penindasan, dan tentunya interferensi dari salah satu oknum berkuasa tersebut kepada kelompok yang didominasi (Faruk dalam Wahyuni, 2019, hlm. 50)

Pertemuan itu dipicu oleh ketegangan antara Gubernur Jenderal Daendels dengan tokoh karismatik itu. Aturanaturan baru yang datang dari Gubernur Jenderal telah mengakibatkan sejumlah bangsawan merasa sesak terdesak dan gerah terpecah (Setiyono, 2012, hlm. 23).

Kecenderungan menguasai suatu bangsa adalah salah satu komponen kebangkitan kaum koloni dalam mendirikan wilayah baru, memimpin, dan memberlakukan aturan-aturan kontemporer di dalamnya. Adapun pada kutipan di atas, Gubernur Jenderal Daendels menjadi bukti adanya interferensi dari bangsa lain terhadap kehidupan masyarakat Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Sebagai politikus kolonial Belanda yang berhasil menguasai dan memerintah wilayah Jawa, khususnya Kasultanan Ngayogyakarta di tahun 1810, Daendels justru menciptakan aturan dan kebijakan baru yang membuat sejumlah bangsawan merasa terdesak dan terperanjat. Salah satunya adalah manajemen hutan yang sepenuhnya beralih menjadi tanggung jawab pihak pemerintahan Belanda. Untuk itulah, Daendels berupaya memperebutkan hutan jati milik tokoh karismatik bernama Raden Rangga

karena dianggap sebagai properti menguntungkan bagi sang Gubernur Jenderal.

Di samping itu, aturan yang tidak kalah menyesakkan diri para bangsawan adalah termaktupnya perubahan kultur dan sistem adat istiadat yang menyulutkan persetujuan antara kubu bangsawan Jawa dengan gubernur Belanda. Mengenai kebijakan tersebut, lebih jelas Marihandono (2008) membentangkannya menjadi dua, yaitu (1), menghapus segala bentuk kedudukan residen di setiap kasultanan dan menggantinya dengan *minister*, yaitu diplomat yang menyubstitusikan semua keperluan Belanda di keraton Jawa, sedangkan kebijakan nomor (2), berkenaan dengan adab upacara menyambut kedatangan *minister*, yang harus diseimbangkan dengan derajat dan kewenangan seorang Raja Jawa (hlm. 31)

Di lain sisi, aturan dan kebijakan Daendels juga melatarbelakangi adanya pemberontakan yang dipimpin oleh Raden Rangga, seorang pejuang yang memprakarsai perlawanan atas kehadiran kolonialisme Belanda di tanah Jawa. Menanggapi pemberontakan itu, Daendels pun mengirimkan beberapa armadanya untuk membinasakan Raden Rangga, sehingga tumenggung Karesidenan Madiun yang disegani oleh masyarakat Jawa itu, menemui kematiannya. Berangkat dari pemberontakan di atas, kodratinya telah mencitrakan bahwa kepemimpinan Daendels belum sepenuhnya dikatakan berhasil menghegemoni kelompok subaltern, karena konsepsi hegemoni baru dikatakan terlaksana ketika ada atau terjalin kesepakatan dari berbagai resistensi sosial dan politik (Siswati, 2017, hlm. 26).

Pemberontakan itu meletus hebat bukan hanya disebabkan pribadi teguh seorang Raden Rangga yang memang jauh dari jiwa budak yang menolak untuk tunduk terbungkuk-bungkuk di depan cecenguk-cecenguk Gubernur Jenderal (Setiyono, 2014, hlm. 24).

Pada 28 November 1810, sekitar pukul 9 malam, Raden Rangga yang diperintah Gubernur Jenderal untuk datang menghadap ke Bogor justru pergi ke Madiun dengan membawa serta tiga ratus prajurit pilihan (Setiyono, 2012, hlm. 25).

Raden Rangga memang dikenal sebagai sosok pembangkang yang menginginkan penumpasan atas kesewenangan Belanda di pulau Jawa. Belum lagi perihal otoritas Daendels yang secara gamblang telah merentakkan harkat dan kehormatan masyarakat Jawa, membuat Raden Rangga semakin culas untuk tunduk dan patuh, baik kepada Daendels atau pun para cecenguknya. Langkah pertama yang dilantaskan oleh Raden Rangga adalah memperlambat keinginan Daendels untuk melibas habis hutan jati miliknya. Oleh sebab itu, pada tahun 1810 Raden Rangga lebih memilih bertolak ke Madiun untuk menghalau segala kemungkinan jika diserbu oleh pasukan Belanda dengan cara mempersiapkan tiga ratus prajurit pilihan, daripada hadir dalam pertemuannya dengan Daendels di Bogor. Gramsci (1999), memandang tindakan Raden Rangga sebagai wujud resistensi dalam menciptakan kepatuhan secara impulsif terhadap kelompok yang berkuasa (hlm. 14).

Integritas Raden Rangga yang berani melawan yuridiksi Gubernur Jenderal Daendels tentu saja kian memvisualkan kandasnya keber-

langsungan sebuah hegemoni. Dalam ikhwal ini, (Siswati, 2017) mengategorikan perlawanan Raden Rangga sebagai wujud hegemoni minimum, yaitu penolakan untuk menyinkronkan diri dengan mekanisme kepemimpinan yang ada (hlm. 22). Dengan demikian, kompleksitas yang tercermin dalam masyarakat politik lebih mengarah pada kekerasan daripada kesepakatan moral dan intelektual, baik untuk merebut atau membentengi hak-hak yang dianggap sebagai kepemilikannya (Adji, 2019, hlm. 4).

Berlainan dengan masa kejayaan Governor Jenderal Daendels. Di era pemerintahan Inggris yang dikemudikan oleh Thomas Stamford Raffles rupanya semakin menambah keterpurukan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Situasi ini ditunjukkan melalui adanya konspirasi politik yang digagas oleh Raffles, sehingga tahta Kasultanan Ngayogyakarta bergulir tidak sewajarnya. Dimulai dari lengsernya kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono II atau yang lebih dikenal sebagai Sultan Sepuh. Kemudian diangkatnya Sultan raja, yang merupakan anak dari Sultan Sepuh untuk menggantikan singgasana sang Ayah, hingga berakhir pada sultan berusia tiga tahun bernama Sultan Menol. Tentunya, intervensi yang Raffles lakukan untuk mengobokobok sistem ketatanegaraan keraton Ngayogyakarta tidak dapat dilepaskan dari tindak kekerasan sebagai replika domain kekuasaan yang teraktual dalam masyarakat politik (Sugiono dalam Partiningsih, 2016, hlm. 32).

Kabar ketenteraman perlu dipertanyakan karena sepeninggal Sultan Swargi, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah

kasultanan yang tidak pernah sepi dari intrik politik yang meresahkan. Dia masih ingat betul bagaimana Sultan Sepuh, anak Sultan Swargi, berebut kekuasaan dengan Sultan Raja yang adalah anaknya sendiri. Dan sekarang, keadaan lebih runyam lagi. Kasultanan ada di tangan Sultan Jarot, seorang sultan yang berusia belasan yang begitu suka hura-hura dan foya-foya (Setiyono, 2014, hlm. 145).

Lengsernya Sultan Sepuh yang telah menjabat sebagai Raja Jawa selama dua periode tidak lain didasari atas sikap Sultan Sepuh pribadi yang menolak untuk bersekutu dengan Raffles. Sehingga bersama tiga ribu lebih tentaranya, Daendels mendatangi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk menindas Sultan Sepuh. Wujud dari penindasan tersebut adalah desakan agar Sultan Sepuh segera meninggalkan tahta dan menyerahkannya kepada Sultan Raja, yang merupakan anak tertuanya sendiri. Namun, sebelum penandatanganan koalisi dilakukan, Inggris beserta balatentaranya yang dikomando oleh Raffles berhasil menggempur keraton dan mengalahkan Belanda.

Peluang itu pun digunakan oleh Sultan Sepuh untuk menduduki kembali tahtanya dan menghukum mati Danurejo II, seorang patih yang diketahui berkomplot dengan kompeni Belanda. Persisnya, perbuatan yang dilakukan Sultan Sepuh terhadap Danurejo II pada 28 Oktober 1811 itu telah mencirikan bahwa bangsawan, dalam hal ini adalah Raja Jawa merupakan bagian dari birokrasi masyarakat politik, jika tindak-tunduk lebih berorientasi pada kemunculan praktik-praktik kekerasan (Siswati, 2017, hlm. 23). Begitu pun (Zahro, 2018) yang

memandang Raja Jawa sebagai fragmen politik karena mengantongi kekuasaan diktatorial yang merancang seluruh aturan untuk rakyatnya (hlm. 8).

Paradigmanya, sikap apatis yang ditunjukkan Sultan Sepuh kepada Inggris menjadi awal dari puncak ketegangan dan disintegritas wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada 20 Juni 1812, sehari sebelum Sultan Raja dinobatkan sebagai pemangku tahta kerajaan, di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Raffles, keraton berhasil diserbu dan dirampok. Dalam peristiwa yang telah meluluhlantakkan Kasultanan Yogyakarta tersebut, hierarki kekuasaan tentunya sangatlah kompetitif dalam memastikan kehidupan masyarakat sosial, ditambah dengan keberadaan birokrasi negara yang sangat esensial peranannya di masyarakat (Syawaludin, 2016, hlm. 142). Namun, bertolak dari hakikat birokrasi yang netral, lingkungan keraton mampu diakomodir oleh masyarakat politik dengan semena-mena, sehingga dalam kaitannya dengan intrik politik, birokrasi negara masih diragukan ketahanannya.

(...) perampokan khazanah keraton itu disebabkan adanya pembangkangan dari raja yang semestinya berperilaku serba menurut. Ya, penjarahan benda-benda yang dikeramatkan itu terjadi ketika ada raja Jawa yang dianggap sudah susah diatur (...) Sultan Sepuh digempur oleh Jenderal Gillespie. Dan para prajurit pengawal raja yang sudah uzur itu tersungkur babak belur (Setiyono, 2014, hlm. 56).

Tentu saja penyerbuan yang berujung penjarahan dan perampokan itu meninggalkan kerugian bagi bangsawan Ngayogyakarta. Sejumlah benda-benda keramat milik keraton,

seperti dokumen, album foto, karya sastra, hingga uang berhasil dirampas. Dampak lain yang tidak kalah berat adalah keterasingan Sultan Sepuh. Sang Gubernur Jenderal menitahkan penangkapan Sultan Sepuh untuk diboyong ke Batavia, menunggu jangka waktu peradilan bagi dirinya selesai.

Idealnya, konflik tersebut berlangsung karena adanya pihak yang menolak untuk menjadi agen dari hegemoni, yaitu Sultan Sepuh. Meskipun hegemoni tidak bertautan dengan penjarahan atau perampokan, namun munculnya suatu kelompok yang mengendalikan kekuasaan kepada kelompok lain melalui kekerasan dan propaganda adalah pijakan awal dari hegemoni, terutama pada masyarakat politik (Simon dalam Shalikhatin, 2015, hlm. 13).

Polemik yang terjadi di Kasultanan Ngayogyakarta tersebut, tampaknya disaksikan oleh Willem, seorang akademikus berkebangsaan Skot. Willem tidak habis pikir melihat kebengisan dan tindakan memalukan yang sedang dilakukan oleh bangsanya sendiri. Alih-alih menjadi bangsa yang selalu diagungkan sebagai pilar peradaban dunia, Inggris justru mentransformasikan perilaku binatang buas. Selain merampok khazanah keraton, tentara Inggris juga merengkuh perempuan Jawa, meskipun telah bersuami untuk dijadikan pemuas nafsu biologisnya. Karena itu, Willem pun mendatangi dan meleraikan segerombolan tentara Inggris, untuk menjaga kemasyhuran bangsanya.

Kudatangi bangsaku yang sudah menjelma menjadi binatang buas itu: "Lepaskan! Kalian semua tentara resmi gubernemen bukan gerombolan penjahat!" (Setiyono, 2014, hlm. 57).

Berdasarkan kutipan di atas, resistensi tentara Inggris yang berperan sebagai antek Raffles lah yang lebih membuktikan prototipe laju kekuasaan masyarakat politik. Partiningsih (2016) memperkuatnya berdasarkan penafsiran bahwa tentara merupakan salah satu pranata publik yang bermarkas dalam bingkai masyarakat politik, yang patuh kepada pimpinan untuk merealisasikan setiap perintahnya (hlm. 32). Demikian pendapat tersebut disimulasikan melalui kebuasan tentara Inggris yang merampas dan memerkosakan perempuan Jawa.

Tidak berselang lama dari peristiwa itu, menurut Marihandono (2008) pada tahun 1816, Komisaris Jenderal dari Belanda menjabat sebagai administrator baru di Kasultanan Ngayogyakarta. Ini berarti, Stamford Raffles mengundurkan diri dan menyerahkan kembali Pulau Jawa ke tangan Belanda (hlm. 34).

4.1.2 Masyarakat Sipil

Kunci utama memahami segala evidensi *branjang* dan *bronjong* yang hanya bersua di lingkungan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah dengan mempelajari bahasa Jawa. Karena itu, Willem memanfaatkan koneksi dirinya dengan Tuan Residen untuk mencari tolek, suatu profesi dari kalangan priyayi yang mengurus pendidikan bahasa, atau dapat disebut sebagai juru bahasa (Misbakhumunir, 2017, hlm. 127). Residen bernama Smissaert itu bersedia. Lalu membuat surat prakata untuk Den Wahyana agar bersiap mengajari Willem.

Dengan menggunakan bahasa pengantar gabungan Belanda-Inggris, pelajaran bahasa yang dipandu oleh Den Wahyana ini seringkali membuatku tertatih-tatih

terengah-engah (Setiyono, 2014, hlm. 15).

Memintasi kenyataan tersebut, Den Wahyana tentu saja sosok yang memegang wewenang mutlak untuk membimbing, mengarahkan, dan bertanggung jawab atas siklus pembelajaran bahasa Willem. Oleh sebab itu, Den Wahyana memiliki keleluasaan untuk mengawasi pembelajaran bahasa Willem. Adapun dalam hal ini, bahasa campuran antara Belanda dan Inggris dipilih sebagai pelajaran pertama. Ringkasnya, karena pada diri Willem bahasa Inggris dikuasai sebagai bahasa ibu, sedangkan bahasa Belanda merupakan bahasa kedua dalam konstelasi hidup masyarakat Kasultanan Ngayogyakarta.

Dalam anotasi Adji (2019), tokoh seperti Den Wahyana telah membagikan cerminan masyarakat sipil dari golongan intelektual setaraf tolek, yang menjalankan perannya untuk memengaruhi dan mengendalikan objek melalui kemahirannya dalam berbahasa (hlm. 4). Sebanding dengan kemampuan tersebut, bahasa difungsikan sebagai substansi keleluasaan pada ranah kekuasaan, yang memonitori keberlangsungan hegemoni integral karena keduanya memperlihatkan afiliasi mutlak. Dengan demikian, baik itu Den Wahyana atau pun Willem saling menandakan kepaduan moral dan intelektual (Siswati, 2017, hlm. 22)

Tentang posisinya di Kasultanan, Den Wahyana pribadi adalah bangsawan yang berkonsolidasi dengan Raden Rangga, seorang pahlawan bagi masyarakat Jawa dan pengacau di mata penjajah. Usut punya usut, Den Wahyana mulai memanfaatkan gelar kebangsawanan dan kedudukannya sebagai tolek untuk memobilisasikan

kiprah perjuangan Raden Rangga dalam cakupan pembelajaran Willem. Penting menurut Wahyana karena perjuangan pahlawan Jawa yang gugur oleh bidikan Letnan Paulus itu (Marihandono, 2008), merupakan pijakan awal yang berkontribusi dalam penelitian Willem (hlm. 32).

Dalam pertempuran itu, Raden Rangga melawan dengan gagah berani, sampai akhirnya dia menemui ajalnya. Ajal yang akan dikenang oleh orang Jawa selama beratus tahun lamanya setelah kejadiannya (Setiyono, 2012, hlm. 27).

Sebelumnya telah disinggung bahwa gejolak pertempuran di Kasultanan Ngayogyakarta tidak lain disebabkan oleh sikap Sultan Sepuh dan pemberontakan yang diluncurkan Raden Rangga. Tumenggung Karesidenan Madiun itu, tampaknya mengendus adanya ketimpangan hak-hak yang merugikan sejumlah bangsawan, bahkan menjarar hingga ke masyarakat. Oleh sebab itu, pemberontakan menjadi alternatif untuk membentengi keraton beserta isinya. Dalam hal ini Sari (2017), mencatat pemberontakan Raden Rangga sebagai wujud konsekuensi yang lahir karena ketidakseimbangan antara otoritas Daendels terhadap kelas yang dikuasainya (hlm. 60). Selain itu, berpangkal dari pemberontakan tersebut, Raden Rangga mencerminkan agen transmudasi dari masyarakat sipil yang beralih menjadi masyarakat politik (Adji, 2019, hlm. 25).

Pemberontakan itu sengaja diceritakan oleh Den Wahyana menggunakan kepingan tiga bahasa, yaitu Inggris, Belanda, dan Jawa, yang tentunya semakin meningkatkan antusiasme Willem untuk mengeksplorasi peristiwa lain yang

berpotensi menjadi bahan kajian. Oleh sebab itu, hampir tiap hari Willem berkunjung ke rumah Den Wahyana di puri Tegalreja. Dengan meniti kuatnya afinitas Willem terhadap keahlian Den Wahyana sebagai tolek tersebut, sejatinya telah membagikan konkretisasi tokoh intelektual yang hanya disenjangkan berdasarkan tingkat kontribusi semata. Dalam kasus ini, tolek semacam Den Wahyana adalah figur dari organisator hegemoni yang berpartisipasi dalam menyebarkan suatu konsepsi pemikiran (Rahmawati dalam Partiningsih, 2016, 33).

Kiranya untuk memperluas kosakata bahasa Jawa, Den Wahyana tidak sekadar berhenti pada kisah Raden Rangga saja, namun juga berbelot mengajak Willem menemui salah satu anteknya yang bernama Ki Sena. Sama halnya Raden Rangga, kehadiran Ki Sena di wilayah Kasultanan dianggap mengusik jalannya roda pemerintahan Belanda. Lantaran itu, Daendels menginternir Ki Sena ke sebuah penjara di Wiragunan.

Ki Sena, itulah nama tokoh itu, salah seorang panglima perang Raden Rangga. Dia kini mendekam di dalam bilik penjara khusus dengan penjagaan istimewa di kawasan Wiragunan (Setiyono, 2012, hlm. 21).

Sebelum menjadi antek berkursi panglima perang Raden Rangga, status Ki Sena dalam hierarki Kasultanan Ngayogyakarta adalah *wong cilik* atau rakyat kecil, pribadi yang harus menghormati bangsawan. Namun bertolak dari keseharusan tersebut, Ki Sena lebih memilih menjadi pemberontak daripada mengabdikan kepada gubernemen setingkat Daendels. Hal tersebut karena sudah barang tentu beroperasinya suatu kekuasaan akan menimbulkan celah yang memicu

pertentangan dari masyarakat sipil, ketika kelas dominan dianggap menyalahi aturan.

Mengutip (Safitri, 2019) yang berpandangan, semenjak *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) hadir di kerajaan Mataram tanah Jawa, diikuti Inggris, dan berakhir di tangan Belanda, kondisi keraton bertambah kacau (hlm. 47). Dalam sudut pandang Zahro (2018) pun demikian, bahwa masa transisi ketiganya tidak banyak menyumbang perdamaian atau pun kejayaan, justru menghimpit masyarakat dari segi kolonial dan kerajaan (hlm. 3). Terlebih rezim belanda yang perlu diakui tekatnya untuk mendisintegrasikan keraton beserta demoralisasinya. Persoalan itulah yang kemudian menjadi pangkal berkomplotnya Ki Sena dalam pembangkangan Raden Rangga.

Pada prinsipnya, konseptualisasi antara masyarakat politik dengan masyarakat sipil memang terpecah dalam kesepadanan yang begitu spesifik karena keduanya lahir dari kemajemukan relasi sosial yang berlainan, sehingga dalam perkembangannya, baik itu masyarakat sipil atau masyarakat politik saling berpacu dalam mencorakkan jati dirinya masing-masing. Adapun Sugiono (dalam Turama, 2014, hlm. 129) memisahkan kedua lapisan superstruktur tersebut berdasarkan dua konsep, yaitu kesepakatan yang terjalin dalam masyarakat sipil dan dominasi dalam wilayah masyarakat politik. Sebab kesepakatan itulah, Muzairi (2014) berpendapat bahwa hegemoni terbina di atas fondasi demokratis masyarakat sipil, yang menyertakan kelas dominan dan subordinat di dalamnya (hlm. 219).

Salah satu masyarakat sipil yang berhasil melancarkan hegemoni adalah

Den Wahyana. Pertama, melalui profesinya sebagai tolek, Den Wahyana berhasil menciptakan persetujuan pada Willem untuk mempelajari bahasa Jawa, yang diajarkan lewat cerita perjuangan Raden Rangga dalam bahasa Inggris dan Belanda, juga pertemuan mereka dengan Ki Sena. Kedua, bertumpu dari bahasa Jawa, Den Wahyana berhasil mengemudikan laju penelitian Willem terkait branjang dan bronjong, dua frase yang merepresentasikan konfigurasi masyarakat Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Persoalan manusia yang dipaksa berkelahi dengan binatang agaknya menggelisahkan Gubernur Jenderal. Buktinya, selang beberapa bulan kemudian diterbitkan peraturan yang melarang orang disabung dengan macan (...) (Setiyono, 2014, hlm. 120).

Berbekal bahasa Jawa yang diajarkan oleh Den Wahyana, Willem telah mengantongi manifestasi *branjang*, yakni sosok abdi dalem atau sejajar dengan aparatur sipil. Tentunya, hasil temuan itu kalah berharga dari bronjong yang diamati sebagai konfigurasi sebuah institusi pengadilan keraton, gubernemen dan raja Jawa. Dalam perspektif Willem, bronjong merupakan perwujudan dari ajang persabungan antara manusia dengan binatang buas, yaitu macan. Lebih tepatnya, bronjong dijadikan sebagai aparatus negara untuk menghukum dan membungkam masyarakat sipil yang terlibat dalam upaya menyembunyikan sekutu Raden Rangga. Senada dengan persoalan bronjong tersebut, Zamzuri (2017) berpandangan, terbentuknya kelompok dominan dan subaltern sejatinya mengindikasikan bahwa negara, yang diwakili keraton telah mendominasi *ideological state apparatus* berwujud

artifisial hukum, sehingga keraton dapat menjalankan supresi terhadap masyarakat sipil (hlm. 15).

Hasil penelitian Willem tentang *bronjong* tampaknya menjadi bukti yang menggelisahkan Gubernur Jenderal, namun memberikan keuntungan bagi masyarakat Kasultanan. Terbukti, beberapa bulan setelah dimuatnya penelitian itu di London Times, telah diresmikan sebuah peraturan yang melarang hukuman *bronjong* di Pulau Jawa. Kesuksesan Willem mengakhiri kesewenangan hukum di Kasultanan itu, tidak dapat diingkarkan dari kecakapan Den Wahyana dalam membangun rekognisi Barat perihal Jawa, khususnya *bronjong* melalui pelajaran bahasa. Dengan demikian, dapat diinferensikan bahwa kedua tokoh, yaitu Den Wahyana dan Willem merupakan model dari intelektual organik karena telah membentuk pola hubungan antara kelas sosial dengan suprastuktur yang ada (Turama, 2014, hlm. 131).

4.1.3 Hegemoni Ideologi

Pada hakikatnya struktur kekuasaan haruslah dipahami sebagai potongan kerangka hegemoni yang mengenakan potongan lainnya dengan ideologi. Hal ini karena ideologi bertindak dalam mengendalikan dan menyediakan ruang bagi setiap manusia, untuk bergerak menemukan kesadaran terhadap kedudukannya masing-masing (Gramsci dalam Zamzuri, 2017, 16). Berpadanan dengan konsep di atas, Andriana (2011) menganggap hegemoni semacam sistem ambigu, yang dilantaskan oleh penguasa untuk mencangkokkan ideologinya ke dalam rasio pihak yang dikuasainya (hlm. 113). Lantaran itulah, hegemoni tidak sekadar

beroperasi pada satu ideologi, akan tetapi dalam berbagai ranah ideologi.

Kehadiran Tuan Leyden, misalnya. Sebagai sosok ilmunan dari Universitas Edinburgh, Tuan Ledyen telah melegalkan kedudukannya untuk mengasung ideologi dari ranah otoritarianisme. Mangunhardjana (dalam Wahyuni, 2019) mendefinisikan otoritarianisme adalah asumsi atau anggapan yang berpijak pada kekuasaan (hlm. 44). Hal ini tampak dari jabatan yang tidak hanya memberikan tempat tertinggi, namun juga membagikan kesempatan bagi Tuan Leyden untuk mengontrol pihak seperti Willem.

“Aku ingin memulai penelitianku dengan mempelajari bahasa Jawa terlebih dahulu,” ujarku mengikuti arahan mendiang Tuan Leyden (...) (Setiyono, 2014, hlm. 13).

Kesempatan itu dilancarkan melalui penelitian Willem tentang *branjang* dan *bronjong*. Sebagaimana yang diamanatkan Tuan Leyden, penelitian pun dilangsungkan Willem dengan terlebih dahulu mempelajari bahasa Jawa. Tegasnya, Willem yang notabene adalah mahasiswa awam, tidak dapat mengelak perintah yang bersifat totaliter tersebut. Karena itulah kemudian, timbul suatu istilah yang oleh Sudibyo (2000) dipredikatkan dalam perumpamaan deifikasi kekuasaan, yaitu menempatkan otoritas ke dalam bingkai bersifat absolut (hlm. 195).

Sebelum menjadi sosok yang sangat dihormati, Tuan Leyden adalah ilmunan yang termarginalkan. Terbukti, beberapa mahasiswa lebih senang menertawakan dan mencemooh penampilannya, ketimbang mendengarkan risalahnya yang dianggap membosankan. Mereka hanya kurang menyadari, bahwa sebenarnya

ujaran, penampilan, serta perilaku yang tercermin pada Tuan Leyden adalah permulaan dari tujuan ideologi untuk menimbulkan kesadaran palsu (Gramsci dalam Andriana, 2011, hlm. 115). Sementara itu, ketika mahasiswa lain sibuk dengan ledekannya masing-masing, Willem justru menyadari bahwa dirinya akan mendapatkan sesuatu dari Tuan Leyden. Sesuatu yang berupa pengetahuan untuk mengubah haluan hidupnya.

Dengan keyakinan tidak bakal terlunta-lunta di tanah Jawa ini, kembali terngiang-ngiang ucapan Tuan Leyden. Perihal kejawaan, yang menurutnya begitu klasik, sekaligus sangat kontemporer (...) (Setiyono, 2014, hlm. 60).

Selama hampir satu tahun mengikuti serangkaian aktivitas masyarakat Kasultanan Ngayogyakarta yang tidak pernah sepi dari pemberontakan, penjarahan, dan kolusi politik, Willem mulai mempertanyakan kelangsungan hidupnya di tanah Jawa ini. Terlebih, dirinya pernah menolak tawaran berharga dari seorang perwira Inggris. Sebuah tawaran yang akan membawanya pulang ke Eropa dan menghilang dari hadapan wajah-wajah orang Jawa yang kesusahan. Tentunya, penolakan itu lantas berbuntut pada bercokolnya Willem di Kasultanan Ngayogyakarta dalam tenggang waktu yang cukup lama. Akan tetapi, dengan berpedoman pada ucapan Tuan Leyden perihal kejawaan yang klasik dan kontemporer itu, Willem mampu melanjutkan dan mempertahankan hidupnya secara produktif. Dalam hal ini, Tuan Leyden kembali melangsungkan otoritasnya untuk menghegemoni jalan pikiran Willem melalui pengetahuannya tentang Jawa. Sinoptiknya, ideologi telah disebar-

untuk mengubah sudut pandang seseorang tentang dunia (Nash dalam Al Hafizh, Faruk, & Juliasih, hlm. 2016)

Kehidupan di Kasultanan Ngayogyakarta tentu saja bertolak dari kehidupan Willem di Eropa, baik berkenaan dengan gaya hidup atau karakterisasi masyarakatnya. Pertama, Willem memandang gaya hidup masyarakat Kasultanan Ngayogyakarta lebih mengusung kesederhanaan dari segi model berpakaian dan tutur bahasa yang diterapkan. Kedua, masyarakat Kasultanan Ngayogyakarta dikarakterisasikan berdasarkan tiga strata sosial, meliputi bangsawan, priyayi, dan *wong cilik*, seperti kebanyakan masyarakat Jawa pada umumnya (Karimah dalam Siswanto, 2010, hlm. 202).

Eksistensi ketiga strata sosial di atas, sejatinya mencorakkan kesudahan dari berjalannya sistem feodalisme di lingkungan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Perihal itu, Fatoni (2011) menegaskan, bahwa adanya strata sosial yang heterogen dalam satu lingkup wilayah merupakan dampak dari kepemilikan tanah oleh kalangan berkuasa yang diberikan wewenang untuk menyetir kepemilikannya tersebut (hlm. 11). Karena itulah kemudian, hubungan yang tercipta antartiga strata sosial adalah setakat hak dan kewajiban. Hak diterima oleh kalangan elite sebagai fraksi dari kaum feodal yang memiliki tanah, sedangkan kewajiban datang dari masyarakat alit yang memerlukan tanah tersebut. Seperti halnya, Pangeran Aria Dipanegara dan bangsawan lain, yang memperbolehkan *wong cilik* untuk memanfaatkan tanah miliknya.

Juraganku, pemilik rumah yang kutempati ini, juga pemilik tanah-

tanah persawahan di sekelilingnya,” jawabnya dengan nada dan roman suara bangga (Setiyono, 2014, hlm. 137).

Pangeran Aria Dipanegara adalah empunya rumah yang ditempati seorang abdi dalem bernama Branjang, dan juga pemilik tanah persawahan di sekelilingnya. Keistimewaan atas kepemilikan tersebut tidak lain disebabkan karena adanya legitimasi otoritas raja Jawa, yaitu Sultan Hamengku Buwono III atau Sultan Raja, yang adalah ayahnya sendiri. Dalam sejarahnya, Moedjanto (dalam Anggraeni, 2012) menyatakan bahwa penguasaan tanah oleh bangsawan Kasultanan Ngayogyakarta, diprakarsai dari termaktubnya perjanjian Giyanti pada tahun 1755, yang salah satu hasil perjanjian itu, mengukuhkan Sultan Hamengku Buwono sebagai pemilik tanah di sektor Barat kerajaan Mataram, sehingga berhak menerima pendapatan dari masyarakat yang menyewa dan atau mengelolah tanah tersebut (hlm. 58). Dengan demikian, tanah menjadi aset yang memberikan keuntungan secara finansial, juga sistem kekuasaan.

Di samping itu, adanya kerelaan dan kesepakatan *wong cilik* untuk membayar sejumlah pungutan atau uang sewa tanah menunjukkan, bahwa hegemoni ideologi dalam ranah feodalisme sedang dilangsungkan oleh bangsawan. Mengutip (Pawestri, 2015, hlm. 20) yang mengindikasikan keberlangsungan tersebut berdasarkan penguasaan tanah oleh kalangan bangsawan secara utuh, sedangkan masyarakat proletar yang berkepentingan menyanggam tanah itu, berkewajiban membayar pajak beserta upetinya. Di sisi lain, Anggraeni (2012) berpendapat, bahwa kewajiban atas

peminjaman tanah, juga dapat dilunasi dengan kesediaan diri untuk mengabdikan dan melayani empunya tanah tersebut (hlm. 58). Kondisi inilah yang paling dominan terjadi di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Aku kadang mengamati gerak kehidupan di sekitarku, bahwa warisan berupa tanah subur, dengan kehangatan matahari yang bikin penghuninya makmur, malah jadi penghalang bagi orang Jawa untuk menjalani hidup yang lebih bermartabat, hidup karena kerja keras, karena akalunya yang diperas. Yang kelas atas, yaitu para ningrat aristokrat, lebih suka digaji daripada mencari penghasilan sendiri. Yang kelas bawah, yaitu kawula alit lebih suka menghambakan diri (...) (Setiyono, 2014, hlm. 131).

Di Kasultanan Ngayogyakarta, kondisi itu dapat diamati melalui keberadaan para jongos yang mengabdikan diri sebagai pembantu di setiap rumah bangsawan atau kediaman penduduk asing yang bermukim di Kasultanan. Pengabdian tersebut dilakukan karena mayoritas dari para jongos tidak dapat membayar biaya sewa tanah pekarangan, sehingga menjadikan kemampuan dan keterampilan dirinya sebagai pengganti atas kompensasi tersebut.

Dalam pandangan Willem, kondisi itu semakin memudahkan harkat dan martabat masyarakat Kasultanan Ngayogyakarta karena kalangan alit lebih suka menerima hasil atas kepemilikan tanah, sedangkan masyarakat alit sudah berkenan menghambakan diri ketimbang bekerja keras. Kendati demikian, kondisi yang tengah berlangsung di atas, dapat mengaktualkan ideologi liberalisme pada Willem, yaitu kebebasan dalam berpikir,

mengkritik, dan berpendapat (Al Hafizh et al., 2016, hlm. 134).

Bertolak dari Willem, ideologi liberalisme juga dimanifestasikan oleh Raffles dalam wujud penolakan atas kaum feodal, yang pernah digencarkan pada tahun 1811. Bagi Raffles, berlakunya sistem feodalisme hanya akan menindas keleluasaan masyarakat untuk hidup yang lebih produktif. Penolakan itu terjadi ketika Inggris berhasil menggeser kedudukan koloni Belanda di periode pemerintahan yang pertama. Dalam ihwal ini, Raffles mengukuhkan beberapa aturan dasar mengenai kebijakan perekonomian Jawa. Salah satunya bertautan dengan hak dan kewajiban penguasaan tanah. Melengkapinya dari pemaparan (Ginting & Sutomo, 2011), bahwa sistem ekonomi yang efisien dan produktif untuk dipraktikkan di Pulau Jawa adalah yang terbebas dari segala bentuk upeti (hlm. 53). Hanya saja, kebijakan tersebut tidak berselang lama setelah Kasultanan direbut kembali oleh Belanda dari genggamannya Inggris.

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat semakin jauh meninggalkan kawula dasih yang melatalata di tanah dilanda berbagai macam pajak (Setiyono, 2014, hlm. 269).

Di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Van der Capellen, sejumlah pajak yang tidak proposional harus ditanggung oleh seluruh lapisan masyarakat Kasultanan Ngayogyakarta. Di samping itu, Jenderal Capellen juga mengkonsolidasikan peraturan yang melarang bangsawan menyewakan tanah miliknya tanpa seizin dari koloni Belanda, baik kepada masyarakat alit atau pun orang asing. Kendati demikian, masyarakat Kasultanan tidak melawan bahkan menentang kebijakan tersebut.

Harjito (2014) menambahkan, penerimaan yang dilakukan oleh masyarakat didasari atas anggapan, bahwa kehadiran kalangan borjuis sekelas Capellen pun mampu membawa koherensi di lingkungan mereka (hlm. 15). Sehingga yang terjadi berikutnya adalah berlangsungnya hegemoni integral.

4.2 Struktur Sosial Masyarakat Jawa Era 1810–1824 dalam Novel *Dasamuka* Karya Junaedi Setiyono

Secara garis besar, struktur sosial masyarakat Jawa yang terdapat dalam novel *Dasamuka* karya Junaedi Setiyono dibedakan menjadi dua kategori kelas sosial, yakni kalangan elite dan kalangan alit, yang keduanya saling mempertahankan hubungan, keteraturan, dan memiliki idealisme masing-masing (Kusmanto & Elizabeth, 2018, hlm. 40). Adapun dari segi idealisme itu, kedua struktur sosial dipetakan atas bangsawan dan priyayi dalam kesatuan kalangan elite, sedangkan wong cilik merupakan bagian dari kalangan alit (Karimah dalam Siswanto, 2010, hlm. 202). Hanya saja, tatanan struktur tersebut tidak terepresentasikan secara konseptual karena dipicu kolonialisme yang berlangsung pada tahun 1810–1824.

Terjadi tiga kali pergantian rezim kolonial dalam kurun 1810–1824, yang mengakibatkan ketidakstabilan politik dan konstelasi bangsawan, khususnya raja-raja Jawa. Adapun ketidakstabilan itu dimulai dari masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels dari Belanda. Daendels rupanya menerapkan sejumlah aturan yang justru menyulitkan jalannya otoritas bangsawan, terlebih kebijakan alternasi kedudukan Raja Jawa

dengan minister Belanda. Namun, tidak berjarak satu tahun dari masa pemerintahannya, balatentara Inggris berhasil menggeser posisi Daendels dan digantikan oleh Thomas Stamford Raffles.

Pada tanggal 3 Agustus 1811, armada kapal Inggris, yang berjumlah seratus kapal perang dengan dua belas ribu awaknya sudah berada, di perairan Sunda Kelapa (...) penaklukan bala tentara Belanda yang bercokol di Batavia tak sesulit yang kuduga (Setiyono, 2014, hlm 1).

Kemudian aku harus menjadi saksi yang tidak mengenakan atas ditariknya Inggris dari Hindia Belanda pada 1816 (Setiyono, 2014, hlm. 168)

Pada periode pemerintahan Raffles itulah setidaknya telah terjadi kesewenangan alternasi tahta kerajaan, bahkan berujung pengasingan Raja Jawa yang dianggap tidak mematuhi aturan. Situasi tersebut tentunya semakin memperburuk konstilasi pemangku tahta Kasultanan Ngayogyakarta. Kendatipun demikian, kehadiran Raffles juga turut serta berkontribusi secara konklusif terkait kebijakan perekonomian Jawa, salah satunya memberikan kebebasan upeti dari tanah yang disewa oleh kalangan alit. Hingga akhirnya, pada tahun 1816–1824 pergantian rezim jatuh di tangan Belanda untuk yang kedua kalinya, disertai dengan bergejolaknya perang Jawa oleh Pangeran Aria Dipanegara.

Berdasarkan sekilas peristiwa di atas, dapat dikatakan bahwa kolonialisme menduduki hierarki tertinggi pertama dalam struktur sosial masyarakat Jawa yang berkeinginan untuk merebut kekuasaan dan mendirikan wilayah kedaulatannya

sendiri dengan menghegemoni segenap bangsawan. Sebab itu, Simatupang (2013) mempersempit pemaknaan kolonialisme sebagai ekspatriat yang berkedudukan lebih tinggi karena menjadi nahkoda dari ketidakseimbangan antargolongan elite, yaitu bangsawan (hlm. 64).

Dalam pemikiran masyarakat Jawa, bangsawan digambarkan sebagai orang terhormat yang titahnya selalu dipatuhi oleh pribumi atau kalangan alit. Hal tersebut turut dipaparkan Zahro (2018), bahwa bangsawan adalah induk kekuatan politik yang memiliki pengikut dan mampu mengontrol arah gerak pengikutnya, hanya dengan berpangkal pada kedudukan tertinggi di Kasultanan (hlm 8). Oleh sebab itu, baik Belanda atau pun Inggris menjadikan bangsawan sebagai tunggangan untuk melangsungkan konstelasi hegemoni.

Adapun kalangan bangsawan sekelas raja yang pernah menduduki tahta Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sepanjang tahun 1810–1824, meliputi Sultan Sepuh, Sultan Raja, Sultan Jarot, dan Sultan Menol. Kedudukan keempat sultan sebagai Raja Jawa itu, tidak diterima melalui cara lain, kecuali hasil perwarisan dari suatu perkawinan dengan bangsawan (Nugroho & Kahija, 2016, hlm. 519). Dari keempat sultan tersebut, Sultan Jarot dikenal sebagai pribadi yang lebih suka memanfaatkan gelar dan kedudukannya untuk menindas kalangan *wong cilik*, seperti Ngusman dan rekan kerjanya.

Kebencian Ngusman pada Sultan Jarot salah satunya adalah karena perilaku sultannya yang aneh itu: begitu tidak menghargai nyawa manusia, nyawa teman-temannya (Setiyono, 2014, hlm. 259).

Ngusman adalah potret *wong cilik* yang bertugas sebagai penarik

kereta kencana milik Sultan Jarot. Sebab tugasnya itu, Ngusman sendiri hampir menemui ajalnya karena terpijak kuda atau tergilas roda kereta. Sultan Jarot sangat gemar berpesiar ke seluruh wilayah Kasultanan, bahkan merancang jalur lintasannya sendiri. Namun, karena cara berpesiarnya yang sembrono itu, Sultan Jarot telah membunuh beberapa penarik kereta lainnya, sehingga menyulut kebencian pada Ngusman. Meskipun demikian, selain karena faktor trah kebangsawanan dari Gusti Kanjeng Ratu Kencana, faktor lain yang menyebabkan Sultan Jarot tetap dikukuhkan sebagai Raja Jawa adalah pakem Kasultanan Ngayogyakarta, yaitu Pugeran. Menurut Rahim (2016), Pugeran itu memuat aturan yang mengharuskan sosok laki-laki berdarah bangsawan sebagai pemimpin Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (hlm. 203). Oleh karena pakem itu juga, Sultan Menol yang masih berusia tiga tahun dinobatkan untuk menggantikan kedudukan Ayahnya, yaitu Sultan Jarot pada tahun 1823.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis serangkaian peristiwa yang membangun novel *Dasamuka* karya Juanedi Setiyono, dapat diuraikan dan dideskripsikan, bahwa potret hegemoni kekuasaan diklasifikasikan menjadi tiga. Pertama, masyarakat politik yang diwakili oleh kolonial Belanda dan Inggris, Sultan Sepuh, dan Raden Rangga, yang mengaplikasikan tindak kekerasan. Kedua, masyarakat sipil mengarah pada tokoh intelektual yang melangsungkan hegemoni secara konsensus. Ketiga, melalui hegemoni ideologi, meliputi ideologi otoritarianisme, feodalisme, dan

liberalisme. Adapun struktur sosial masyarakat Jawa pada era 1810–1824 yang terepresentasikan dalam novel *Dasamuka* membuktikan bahwa kolonialisme menduduki struktur pertama, dilanjutkan bangsawan, dan berakhir pada *wong cilik*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, S. E. P. (2019). Relasi kekuasaan dalam novel bertema politik pada sastra Indonesia 2000-an. *Seminar Dies XXVI Fakultas Sastra "Peran Pendidikan Humaniora Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Bermartabat,"* (April), 1-12.
- Al Hafizh, M., Faruk, & Juliasih. (2016). Identifikasi ideologi dan pola relasinya dalam novel-novel Jacqueline Woodson. *Atavisme*, 19(2), 130-147.
- Andriana, N. (2011). Hegemoni ideologi dalam konstruksi identitas budaya masyarakat Melayu Riau pada desain arsitektur the ideological hegemony in the construction of Melayu Riau community cultural identity on the architecture design. *Widyariset*, 14(1), 113-122.
- Anggraeni, T. D. (2012). Interaksi hukum lokal dan hukum nasional dalam urusan pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Rechtsvinding*, 1(1), 53-74.
- Faizah, U. (2015). Kajian sosiologi sastra dan nilai pendidikan karakter novel *Dasamuka* karya Junaedi Setiyono. *Semnas: Universitas Muhammadiyah Purwokerto*.
- Fatma, H., Suwandi Sarwiji, & Slamet St. Y. (2019). Willem's personality in the novel *Dasamuka* by Junaedi

- Setiyono. *Lingua Didaktika*, 12(2), 140-153.
<https://doi.org/10.24036/ld>
- Fatoni, A. (2011). *Krisis kekuasaan feodal di Desa Perdikan Makam Kabupaten Purbalingga 1945-1961*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ginting, R., & Sutomo, A. (2011). Sistem sewa tanah dalam upaya penghapusan feodalisme di Jawa abad XIX. *CIVIS*, 1(1), 52-57.
- Gramsci, A. (1999). Selections from the prison notebooks. In Q. Hoare & G. N. Smith (Eds.), *The Civil Society Reader* (pp. 1-846). London: ElecBook.
- Harjito. (2014). *Hegemoni Gramsci dalam sastra Indonesia: Student hijo, nasionalisme, dan wacana kolonial*. Upgris Press.
- Hatmoko, M. D., Sumartini, & Mulyono. (2014). Hegemoni moral Nyai Kartareja terhadap Srintil dalam novel *Jantera Bianglala* karya Ahmad Tohari: Kajian hegemoni Gramsci. *Jurnal Sastra Indonesia*, 3(1), 1-9.
- Kusmanto, T. Y., & Elizabeth, M. Z. (2018). Struktur dan sistem sosial pada aras wacana dan praksis. *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo*, 2(1), 39-50.
- Marihandono, D. (2008). Sultan Hamengku Buwono II: Pembela tradisi dan kekuasaan Jawa. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 12(1), 27-38.
- Misbakhmunir. (2017). *Analisis strukturalisme genetik novel Dasamuka karya Junaedi Setiyono dan rencana pembelajarannya di kelas XI SMA*. Universitas Muhammadiyah Purworejo.
- Muzairi. (2014). Pergeseran sistem kekuasaan dari Marxisme ke hegemoni dan politik media. *Esensia*, 15(2), 213-228.
- Nugroho, M. D. S., & Kahija, Y. F. La. (2016). Makna pemakaian gelar kebangsawanan Jawa (Sebuah interpretative phenomenological analysis). *Empati*, 5(3), 518-523.
- Partiningsih. (2016). Ideologi pembangunan orde baru dalam sastra anak Balai Pustaka tahun 80-an. *Atavisme*, 19(1), 29-44.
- Patria, N., & Arief, A. (2015). *Antonio Gramsci negara & hegemoni*. Pustaka Pelajar.
- Pawestri, S. (2015). *Hegemoni kekuasaan dalam novel Bibir Merah karya Achmad Munif*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahim, M. A. (2016). Elit, cultural capital, dan sabda raja dalam sukses kepemimpinan keraton dan gubernur DIY. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 6(1), 201-240.
- Rifa'i, M. (2018). Kajian masyarakat beragama perspektif pendekatan sosiologis. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 23-35.
- Safitri, I. (2019). Keraton Yogyakarta masa lampau dan masa kini: Dinamika sukseji raja-raja Jawa dan politik wacana "raja perempuan." *Indonesian Historical Studies*, 3(1), 44.
- Sari, N. K. (2017). *Hegemoni kekuasaan pemangku adat Minangkabau dalam novel Tenggelamnya Kapal van Der Wijck karya Hamka: Kajian hegemoni Gramsci*. Universitas Negeri

- Semarang.
- Setiyono, J. (2014). *Dasamuka*. Elmatara.
- Simatupang, M. S. (2013). Hegemoni Kekuasaan dalam Novel "Bumi Manusia" Karya Pramoedya Ananta Toer: Suatu Kajian Postkolonial. *Dialektika*, 2(1), 60-85.
- Siswanto, D. (2010). Pengaruh pandangan hidup masyarakat Jawa terhadap model kepemimpinan. *Filsafat*, 20(3), 204.
- Siswati, E. (2017). Anatomi teori hegemoni Antonio Gramsci. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 5(1), 11-33.
- Sudiby. (2000). Mistifikasi dan pengagungan kekuasaan dalam babad dan hikayat: Kontinuitasnya dalam sistem kekuasaan Indonesia modern. *Humaniora*, 12(2), 195-204.
- Sulistyowati, R. (2018). *Representasi kekuasaan tokoh informal dalam novel Dasamuka karya Junaedi Setiyono*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Syawaludin, M. (2016). Analisis sosiologis terhadap sistem pergantian sultan di kesultanan Palembang Darussalam. *Intizar*, 20(1), 139-162.
- Turama, A. R. (2014). Pergeseran kekuasaan negara dan relasi antarsubjek dalam cerpen orde baru dan reformasi. *Poetika*, 2(2), 172-136.
- Wahyuni, P. (2019). Hegemoni kekuasaan dalam novel Hujan karya Tere Liye dan implikasinya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. *Jurnal Skripta*, 5(1), 41-58.
- Zahro, L. H. (2018). *Konflik dan konsensus dalam konstelasi politik keraton Yogyakarta (Kajian sosiologi sastra novel Dasamuka karya Junaedi Setiyono)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Zamzuri, A. (2017). Ideologi dalam novel Pabrik karya Putu Wijaya. *Atavisme*, 20(1), 14-26.